

APKOM Jogja

Asosiasi
Pengusaha
Komputer
Jogja

nDherek Mangayubagya Atas Pelantikan





GUSTI KANJENGRATU HEMAS



R.A. YASHINTA SEKARWANGI MEGA



IR AHMAD SYAUQI SOERATRO NM



Dr H HILMY MUHAMMAD MA

**Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta. Periode 2024 - 2029**



PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

krjogja.com
Lebih Mengerti Jogja
dari **JOGJA** untuk **DUNIA**

Redaksi:
Jl. P. Mangkubumi No. 40-46
Yogyakarta 55232
redaksi@krjogja.com
Telp : +62-274 315 5542

Iklan:
iklan@krjogja.com
Telp : +62-274 550 892
Fax : +62-274 550 890
www.krjogja.com

Koran Merapi

Tuntas Tanpa Tendensi

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

KEJAR TARGET PAD RP 1 TRILIUN

Pemkot Gencarkan Digitalisasi Genjot Pendapatan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menggenjot digitalisasi keuangan untuk menggenjot sektor pendapatan daerah. Apalagi sudah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif untuk mengejar target Rp 1 triliun untuk pendapatan asli daerah (PAD) paling lambat pada tahun depan.

Digitalisasi keuangan yang dimotori oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogya salah satunya dengan penyediaan layanan QRIS sebagai metode pembayaran kewajiban ke kas daerah.

"Metode pembayaran ke kas daerah menggunakan QRIS sudah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mendukung transaksi nontunai. Penggunaannya juga akan terus

diperluas," ungkap Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, Senin (30/9).

Menurut Sugeng, pada tahun 2023 lalu total PAD yang berhasil diraih Kota Yogya mencapai sekitar Rp 803 miliar atau 115 persen dari target. Tanpa harus menunggu tahun depan, bukan tidak mungkin PAD tahun ini bisa menembus Rp 1 triliun. Semakin besar capaian PAD yang diraih maka kemandirian daerah dalam melakukan pembangunan bisa terwujud. Hal ini karena daerah tidak lagi banyak bergantung pada transfer keuangan dari pusat.

"Untuk mengejar target PAD mencapai Rp 1 triliun, kita memiliki tantangan memaksimalkan potensi baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan

inovasi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien tentu harus diapresiasi," tandasnya.

Kepala BPKAD Kota Yogya Rr Andarini, menjelaskan sewa aset sangat berpeluang untuk dapat diekstensifikasi guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Pihaknya juga sudah menelurkan inovasi metode QRIS untuk kepentingan pembayaran sewa aset. Sewa aset daerah yang dimaksud seperti penggunaan gedung, tanah dan fasilitas milik pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang signifikan. "Digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan hanya soal mempermudah pembayaran, namun juga soal transparansi dan akuntabilitas. Melalui QRIS sewa aset yang sudah kami luncurkan pekan lalu,

harapannya proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu dapat disederhanakan menjadi lebih praktis dan efisien sehingga memudahkan masyarakat," urainya.

Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital, catatan transaksi dapat tercatat secara lebih baik. Selain itu mampu meminimalisasi potensi kesalahan maupun kebocoran, dan memungkinkan pemerintah untuk melakukan monitoring secara realtime. Andarini mengungkapkan dengan menggunakan QRIS sewa aset, masyarakat dapat memanfaatkan aset-aset milik daerah dengan melakukan pembayaran secara cepat dan aman melalui telepon seluler. Sistem dapat diakses mulai 1 Oktober 2024 untuk kategori lapangan dan

gedung olahraga.

Di samping menggenjot digitalisasi dalam metode pembayaran ke kas daerah, BPKAD Kota Yogya juga rutin memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah tertib dan taat menunaikan kewajibannya. Salah satunya terhadap wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memiliki transaksi pembayaran terbesar secara digital. Penghargaan ini diberikan kepada PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Bank Indonesia DIY dan H-Boutique Hotel. "Dengan memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dan aktif bertransaksi secara digital, akan tercipta budaya baru di masyarakat yang lebih terbuka terhadap teknologi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka," jelas Andarini. **(Dhi)-d**

TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN MAKIN KOMPLEKS

L2DIKTI V Berkomitmen Tingkatkan Mutu PT

YOGYA (KR) - Predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para pengelola Perguruan Tinggi (PT). Karena predikat itu membawa sejumlah konsekuensi, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas lulusan dan layanan. Walaupun dalam realitanya untuk mewujudkan hal itu tidak mudah, karena kondisi PTS yang ada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah V cukup beragam.

Menyikapi kondisi tersebut L2Dikti Wilayah V menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong peningkatan kualitas dan mewujudkan akreditasi unggul. "Tantangan global

yang dihadapi oleh pengelola PTS cukup kompleks. Adanya slogan *ndulur lima* yang mengartikan kita semua (PTS) adalah sedulur (saudara), jadi harus maju bersama bukan sendiri," kata Kepala L2Dikti Wilayah V, Prof Setyabudi Indartono PhD didampingi koordinator Humas Pungki Hemawati saat bersilaturahmi dengan Direktur Litbang Pengawasan dan Bisnis PTBP Kedaulatan Rakyat, Yoeke Indra Agung Laksana SE di ruang kerjanya, Jumat (27/10).

Lewat semangat kebersamaan ini, Prof Setyabudi berharap bisa meningkatkan kualitas PTS agar memiliki akreditasi unggul dan menjadi pilihan masyarakat baik di ting-

kat nasional maupun global.

Saat menerima kunjungan silaturahmi tersebut Yoeke Indra didampingi Direktur Umum Ir Dyah Sardjuningrum Sitawati, Komisaris Utama Imam Satriadi SH dan Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat Dr Octo Lampito MPd.

Setyabudi Indartono mengungkapkan, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021, L2Dikti V berkomitmen untuk memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui strategi leapfrogging dan pemanfaatan seluruh resources secara bersama. Melalui strategi tersebut, harapannya

PTS-PTS di DIY diharapkan bisa saling sharing resources. Terutama bagi PTS yang memiliki resources terbatas, dapat bekerja sama dengan PTS dengan resources yang berkualitas dan memadai.

"Peningkatan kualitas pendidikan di DIY tidak hanya

menjadi tanggung jawab pengelola PT atau pemerintah, tapi butuh peran aktif dan dukungan semua pihak. Dukungan tersebut sangat diharapkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan unggul," ungkapnya. **(Ria)-d**



Prof Setyabudi Indartono PhD dan Pungki Hemawati bersama jajaran Direksi PTBP Kedaulatan Rakyat.

ENDRO SULAKSONO

Masuki Periode Kedua, Kawal Hunian Layak untuk Warga



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Endro Sulaksono kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Warga yang tinggal di Klitren ini pada periode keduanya, salah satunya akan mengawal kebutuhan hunian layak bagi warga.

Selama periode pertama menjabat wakil rakyat, Endro mendapat amanah di Komisi C yang membidangi urusan infrastruktur termasuk sampah, lalu lintas dan kebencanaan. Meski alat kelengkapan dewan masih dalam proses pembentukan namun dirinya berharap bisa kembali menempati komisi yang sama. "Ditempatan di komisi mana pun kami semua harus siap. Tetapi jika kembali di Komisi C maka kebutuhan hunian layak memang masih harus diperjuangkan," tandasnya.

Endro yang tahun ini genap berusia 46 tahun menilai, kebutuhan hunian menjadi hal yang harus dipenuhi oleh setiap warga. Akan tetapi keterbatasan lahan yang ada di Kota Yogya menjadi kendala, terutama bagi warga dengan penghasilan rendah. Hal ini karena harga tanah cenderung terus mengalami kenaikan begitu pula untuk tarif sewa tempat tinggal. Oleh karena itu rumah susun yang difasilitasi oleh negara menjadi salah satu solusi pemenuhan kebutuhan hunian.



KR-Ardhi Wahdan

Pembangunan rumah susun sebetulnya juga sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sehingga dibutuhkan inovasi agar keterbatasan lahan tidak menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak tersebut. "Misalnya pasar tradisional yang perlu direvitalisasi, maka bisa dikembangkan rumah susun di atasnya. Jadi di bawah untuk kepentingan pasar tradisional, di atasnya untuk tempat tinggal. Tentu ini juga butuh dukungan regulasi, tetapi kan bisa diupayakan," urai politisi PDI Perjuangan ini.

Begitu pula lahan wedi kengser dengan status Sultan Ground (SG) juga sudah diperkenankan untuk hunian masyarakat. Pemkot, menurutnya, pasti sudah memiliki peta luasan lahan wedi kengser yang layak untuk dibangun rumah susun. Hal itu sekaligus menjadi upaya pengentasan kawasan kumuh perkotaan dengan menciptakan tempat tinggal yang tertata, bersih serta menjamin kenyamanan dan keselamatan warganya. Terkait kebutuhan anggaran untuk melakukan pembangunan, Endro mengaku, seharusnya juga bukan menjadi halangan. Jika APBD Kota Yogya belum bisa mencukupi maka kalangan anggota dewan bisa melakukan advokasi ke Pemerintah Pusat atau APBN.

"Papan atau tempat tinggal ini kan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Kami di lembaga dewan akan terus mendorong supaya warga memperoleh tempat tinggal yang layak. Tentu ini juga harus diupayakan secara bersama-sama dengan pemerintah," tandas Endro yang aktif dalam Pengurus Kampung Klitren ini. **(Dhi)-d**

DAPAT DIPANEN KURANG DARI 70 HARI

Fapet UGM Luncurkan Ayam Lokal Galur Baru



Prof Dyah Maharani menyampaikan paparan dalam acara Fapet Menyapa.

YOGYA (KR) - Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (Fapet UGM) membuat program inovatif dalam pembentukan ayam lokal galur baru. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional secara mandiri.

Peneliti dari Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Ternak Fapet UGM Prof Dyah Maharani Ir SPT MP PhD IPM menuturkan, program ini menargetkan pembentukan ayam lokal galur baru dengan berat 0,8 kg yang dapat dipanen

lebih cepat, memberikan keuntungan bagi peternak dengan perputaran uang yang lebih pendek dan margin yang lebih tinggi," papar Dyah yang juga ketua tim pembentukan ayam galur baru Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Ternak, Fapet UGM dalam acara Fapet Menyapa, belum lama ini. Selain Dyah, hadir dalam acara tersebut peneliti lainnya, Galuh Adi Insani SPT MSC.

Menurut Dyah, setelah mencapai generasi keempat, performa ayam diharapkan stabil dan siap untuk di-scale up produksinya bersama mitra industri Fapet UGM. Inisiatif ini tidak bertujuan untuk menggantikan ayam broiler, melainkan untuk mensubstitusi produksi daging sebagai sumber protein alternatif bagi masyarakat yang berasal dari produk lokal Indonesia.

Dengan demikian, pemenuhan target ketahanan pangan secara mandiri dapat segera tercapai, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. **(Dev)-d**